



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

**(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

---

Tahun Sidang : 2024-2025

Masa Persidangan : II

Rapat ke : 17 (tujuh belas)

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Dengan : Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Sifat Rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 24 Februari 2025

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara : Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik RUU  
tentang Perubahan Ketiga atas UU No.13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan

Ketua Rapat : drg. Putih Sari/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat  
Komisi IX DPR RI

Hadir : A. Anggota DPR RI  
15 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI  
B. Pemerintah  
- Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR  
RI; Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum beserta  
jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dibuka pukul 13.29 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

Komisi IX DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan terhadap perkembangan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Mengapresiasi penjelasan perkembangan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh Badan Keahlian DPR RI;
2. Menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk mengkaji materi/subtansi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta membuat sandingan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan Komisi IX DPR RI;
3. Menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan pendalaman atas saran dan masukan dari Anggota Komisi IX DPR RI terkait pola hubungan kerja kemitraan, cuti, perselisihan hubungan industrial (PHI), peran serikat pekerja, sistem pengupahan, dewan pengupahan, upah sektoral, pekerja informal termasuk pekerja rumah tangga (PRT), pesangon, tenaga kerja asing, tenaga kerja kontrak dan jenis pekerjaan alih daya.

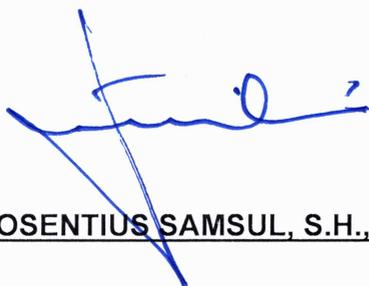
### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.48 WIB.

Jakarta, 24 Februari 2025

**KEPALA BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI,**

**KETUA RAPAT,**



Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum



drg. PUTIH SARI  
A-100